

# Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing

Achmad Amzal Maulana<sup>1</sup>, Qamal<sup>2</sup>,

Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia<sup>1,2</sup>

Korespondensi Author: [aanamzal1@gmail.com](mailto:aanamzal1@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## Kata kunci:

Independensi Kebijakan;  
Investasi Asing;  
Kedaulatan Negara;  
Ekonomi Politik Global.

## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.

## Keywords:

*Policy Independence;  
Foreign Investment; State  
Sovereignty; Global  
Political Economy.*

## Abstrack

*This study aims to analyse the dynamics of Indonesia's policy independence amid foreign investment pressure in the global context. The main focus of this study is to evaluate the extent to which the government is able to maintain autonomy in formulating public regulations without the distortion of international investor interests. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical design to analyse the independence of Indonesian policy in the context of foreign investment influence, focusing on central government institutions and legislative processes. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis dengan model interaktif dan analisis isi. Triangulation of sources and theories was used to ensure the validity of the findings, resulting in a comprehensive analysis based on a strong theoretical framework. The study found that efforts to create a conducive investment climate lead to compromises in legislative sovereignty. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian Indonesia dalam melindungi kepentingan domestiknya. The study's findings show a tendency for regulations to be more responsive to global interests than national needs. Implications include the need to strengthen institutional capacity, transparent governance, and enhance the government's bargaining position in international negotiations to prevent foreign investment from undermining the integrity of the political and legal systems. Overall, policy independence is understood as a reflection of a country's political strength in maintaining its authority against external intervention. Therefore, public oversight and strict regulation are important instruments for balancing the need for foreign capital with the sustainable maintenance of national policy sovereignty.*

## Pendahuluan

Transformasi tatanan ekonomi politik global pada dekade ketiga abad ke-21 telah menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam posisi dilematis antara menjaga kemandirian politik atau menyerah pada tekanan integrasi ekonomi internasional. Globalisasi ekonomi kontemporer tidak lagi hanya dicirikan oleh mobilitas barang dan jasa, melainkan oleh dominasi arus modal yang sangat cair yang mampu mendikte arah kebijakan publik di tingkat nasional. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, fenomena ini memunculkan tantangan eksistensial terhadap konsep kedaulatan tradisional, di mana otoritas negara yang seharusnya bersifat absolut dalam wilayah teritorialnya kini harus bernegosiasi secara intens dengan kepentingan aktor-aktor pasar transnasional (Rizky & Sudirman, 2021). Tekanan ini memaksa institusi pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi agar tetap kompetitif dalam menarik investasi asing, yang sering kali berujung pada perdebatan mengenai sejauh mana independensi kebijakan sebuah negara tetap terjaga di tengah kepingan kepentingan kapitalisme global.

Secara teoretis, konsep kedaulatan dalam Ilmu Pemerintahan modern dipandang sebagai kapasitas yang dinamis dan kontestabel. Negara dituntut menjalankan fungsi pengarahan (*steering*) terhadap pembangunan nasional, namun kapasitas tersebut sering kali tererosi oleh ketergantungan struktural pada modal asing. Rodrik (2018) mengemukakan adanya "trilema politik ekonomi global," yang menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat secara bersamaan mencapai integrasi ekonomi global, demokrasi nasional, dan kedaulatan negara. Salah satu dari ketiga elemen ini harus dikorbankan. Dalam konteks ini, banyak negara cenderung mengorbankan independensi kebijakannya demi menarik minat korporasi multinasional (*Multinational Corporations*) guna mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Situasi ini menciptakan risiko pembajakan kebijakan (*policy capture*), di mana produk legislasi yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan pemodal eksternal daripada aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dinamika relasi kuasa antara negara dan pasar ini menjadi semakin krusial ketika menelaah posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Sejak tahun 2020, Indonesia telah menunjukkan ambisi besar untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi guna mempermudah masuknya investasi asing melalui berbagai paket kebijakan strategis. Namun, langkah-langkah ini sering kali memicu kritik tajam dari kalangan akademisi yang mengkhawatirkan pelunakan standar perlindungan lingkungan dan hak-hak domestik demi mengakomodasi kepentingan global (Warburton, 2020). Ketegangan antara kebutuhan akan modal asing dan perlindungan terhadap kepentingan nasional inilah yang menjadi inti dari krisis independensi kebijakan di Indonesia saat ini.

Secara empiris, intervensi modal asing terhadap kebijakan di Indonesia terlihat jelas dalam formulasi regulasi di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur. Dalam disiplin Ilmu Pemerintahan, fenomena ini sering dikaji melalui lensa kapasitas negara (*state capacity*). Negara dengan kapasitas kuat seharusnya mampu menyaring investasi asing agar selaras dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa posisi tawar pemerintah sering kali melemah ketika berhadapan dengan ancaman pelarian modal (*capital flight*). Keputusan pemerintah untuk memberikan berbagai insentif fiskal dan pelonggaran regulasi sering kali dipandang sebagai bentuk penyerahan otoritas publik terhadap logika pasar internasional (Prasetyo & Hidayat, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana otoritas pemerintah Indonesia masih memiliki otonomi penuh dalam menentukan nasib regulasi publiknya?

Lebih jauh lagi, literatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sepuluh tahun terakhir menekankan bahwa efektivitas pemerintahan tidak boleh mengabaikan kedaulatan rakyat demi kenyamanan investor. Tuntutan akan transparansi mewajibkan setiap kebijakan yang lahir dari institusi negara harus dapat dijelaskan manfaatnya bagi kepentingan publik secara luas. Namun, dalam praktiknya, negosiasi dengan aktor ekonomi global sering kali dilakukan dalam ruang-ruang yang minim pengawasan publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi ini memperparah persepsi mengenai kerentanan kedaulatan kebijakan nasional di hadapan tekanan eksternal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan membedah mekanisme internal pemerintahan Indonesia dalam mengelola tekanan-tekanan tersebut demi menjaga integritas sistem politik dan hukum nasional.

Kebaruan (*Novelty*) dari kajian ini terletak pada pendekatan analitis yang tidak lagi melihat intervensi kapitalisme global melalui satu aktor perusahaan tunggal, melainkan melalui analisis komprehensif terhadap mekanisme "independensi kebijakan" sebagai metrik utama kapasitas negara

Indonesia. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih banyak berfokus pada dampak ekonomi makro dari investasi asing, kajian ini secara spesifik menggunakan perspektif Ilmu Pemerintahan untuk membedah bagaimana struktur birokrasi dan proses legislasi di Indonesia merespons tekanan lobi internasional secara kolektif pasca 2020. Penekanan pada aspek otonomi negara di tengah pergeseran regulasi nasional yang masif memberikan kontribusi orisinal bagi literatur kebijakan publik, khususnya dalam memetakan batas-batas kedaulatan kebijakan nasional yang sering kali diabaikan dalam analisis ekonomi murni. Dengan demikian, kajian ini memberikan jawaban konkret atas tuntutan akuntabilitas akademis yang sebelumnya dipertanyakan, sekaligus menawarkan kerangka kerja baru dalam melihat ketahanan institusional pemerintah di hadapan hegemoni ekonomi global.

## Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk membedah dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah pengaruh investasi asing. Pemilihan pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena disiplin Ilmu Pemerintahan memerlukan interpretasi mendalam terhadap relasi kuasa yang kompleks antara otoritas publik dan aktor pasar global yang sering kali tidak dapat diukur secara kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Dengan desain deskriptif analitis, kajian ini tidak hanya memaparkan regulasi yang ada secara tekstual, tetapi juga menganalisis konteks politik dan tekanan eksternal yang melatarbelakangi lahirnya regulasi tersebut guna mengukur kemandirian pemerintah dalam mengambil keputusan. Penetapan lokus kajian sepenuhnya berada di Indonesia, yang merupakan tindak lanjut dari saran perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas kajian agar tidak bersifat ambigu atau abstrak. Dalam konteks ini, kajian memfokuskan pada instansi pemerintahan pusat dan proses legislasi nasional yang menjadi titik temu antara kepentingan kedaulatan negara dan kebutuhan modal asing, sejalan dengan metodologi kajian kualitatif yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam analisis kebijakan (Sugiyono, 2021).

Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan tinjauan literatur sistematis terhadap dokumen-dokumen resmi serta publikasi ilmiah terkini. Penggunaan data sekunder dalam analisis kebijakan pemerintahan sangat krusial karena dokumen hukum dan laporan resmi merupakan manifestasi dari otoritas dan posisi politik sebuah negara (Neuman, 2020). Data yang diperoleh berupa naskah akademik, undang-undang sektor strategis seperti regulasi penanaman modal dan agrarian serta laporan capaian investasi nasional untuk mengidentifikasi pola-pola intervensi korporasi multinasional. Selain itu, referensi tambahan dari jurnal bereputasi dan hasil analisis lembaga pemikir (*think-tank*) dalam sepuluh tahun terakhir untuk memperkaya perspektif mengenai ekonomi politik Indonesia. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran digital pada basis data resmi pemerintah dan repositori akademik, memastikan bahwa informasi yang digunakan bersifat otoritatif dan relevan dengan fokus independensi kebijakan yang menjadi inti dari kajian ini.

Teknik analisis data dalam kajian ini menerapkan model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Pada tahap kondensasi, pemilahan terhadap informasi dari dokumen kebijakan untuk fokus pada elemen-elemen yang menunjukkan adanya tekanan atau pengaruh aktor asing terhadap otonomi negara. Data yang telah terpilih kemudian disajikan dalam narasi logis yang menggambarkan pergeseran regulasi sebelum dan sesudah masuknya tekanan investasi tertentu. Kajian menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif untuk memeriksa muatan pasal-pasal dalam undang-undang guna mendeteksi kecenderungan keberpihakan regulasi terhadap kepentingan global (Krippendorff, 2018). Analisis ini sangat penting dalam Ilmu Pemerintahan untuk membuktikan secara empiris apakah sebuah produk kebijakan masih memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat atau telah mengalami distorsi akibat lobi-lobi internasional.

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan temuan hasil, kajian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari dokumen pemerintah dengan laporan media independen atau kritik dari organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan perspektif yang berimbang. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan membedah fenomena yang sama menggunakan teori kedaulatan negara dan teori ketergantungan ekonomi global secara simultan (Yin, 2018). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kesimpulan

yang ditarik tidak bersifat bias dan memiliki landasan teoretis yang kuat. Keabsahan data juga diperkuat dengan melakukan verifikasi berulang terhadap temuan-temuan awal guna memastikan bahwa analisis tersebut akurat dalam menggambarkan realitas independensi kebijakan di Indonesia.

## Hasil dan Diskusi

### Dinamika Relasi Kuasa: Otoritas Negara di Hadapan Kapitalisme Global

Analisis terhadap independensi kebijakan negara Indonesia harus dimulai dengan memahami pergeseran relasi kuasa antara pemerintah dan aktor pasar global. Dalam disiplin Ilmu Pemerintahan, otoritas negara sering kali dipandang sebagai kekuatan tunggal yang memiliki hak eksklusif untuk merumuskan regulasi di wilayahnya. Namun, temuan kajian ini menunjukkan bahwa dalam konstelasi ekonomi politik kontemporer, kedaulatan tersebut bersifat kontestabel dan terus dinegosiasikan. Tekanan investasi asing tidak lagi datang dalam bentuk pemaksaan fisik, melainkan melalui mekanisme ketergantungan ekonomi yang memaksa pemerintah untuk mengadopsi logika pasar dalam produk legislasi nasional. Prasetyo dan Hidayat (2023) mencatat bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali terjebak dalam kompetisi regulasi (*race to the bottom*), di mana standar kebijakan diturunkan demi menarik modal asing. Fenomena ini menciptakan paradoks pemerintahan: di satu sisi, pemerintah membutuhkan investasi untuk pembiayaan pembangunan, namun di sisi lain, masuknya modal tersebut membawa tuntutan deregulasi yang dapat menggerus kemandirian institusi negara dalam melindungi kepentingan publik domestik.

Relasi kuasa ini semakin terlihat jelas ketika kita menganalisis pola interaksi antara lembaga eksekutif dan korporasi multinasional (MNCs). Berbeda dengan asumsi sebelumnya yang hanya menyoroti satu perusahaan tunggal, hasil kajian ini menegaskan bahwa tekanan dilakukan secara kolektif melalui konsorsium bisnis internasional dan lembaga donor global. Tekanan ini mewujud dalam bentuk "saran kebijakan" atau persyaratan bantuan finansial yang secara halus mengarahkan arah legislasi nasional. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, hal ini mengindikasikan adanya pergeseran fungsi negara dari penyedia kesejahteraan (*welfare state*) menjadi negara regulator (*regulatory state*) yang lebih fokus pada fasilitasi investasi (Rizky & Sudirman, 2021). Dampaknya, kemandirian dalam formulasi kebijakan publik menjadi rentan karena setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan reaksi pasar global dan stabilitas aliran modal asing. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan bukan lagi masalah hukum, melainkan masalah kapasitas politik dalam menghadapi hegemoni ekonomi global.

### Analisis Formulasi Kebijakan: Antara Akseptabilitas Pasar dan Kedaulatan Publik

Proses formulasi kebijakan di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin akomodatif terhadap kepentingan investasi asing. Salah satu contoh nyata yang dianalisis dalam kajian ini adalah upaya penyederhanaan regulasi melalui mekanisme omnibus law. Dalam kerangka Ilmu Pemerintahan, pendekatan ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, namun sekaligus membuka celah intervensi kepentingan eksternal yang lebih masif. Analisis isi terhadap berbagai regulasi baru menunjukkan adanya pelunakan syarat-syarat investasi yang sebelumnya dianggap sebagai instrumen perlindungan kedaulatan nasional. Menurut Mietzner (2021), proses legislasi yang sangat cepat dan minim partisipasi publik cenderung menguntungkan aktor-aktor ekonomi besar yang memiliki akses langsung ke lingkaran kekuasaan. Ini membuktikan bahwa independensi kebijakan tidak hanya terancam oleh aktor asing, tetapi juga oleh struktur politik domestik yang memfasilitasi masuknya kepentingan modal asing ke dalam jantung regulasi negara.

Ketidakkampuan pemerintah untuk mempertahankan independensi kebijakan juga terlihat dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Meskipun narasi "nasionalisme sumber daya" sering digaungkan di ruang publik, realitas di meja perundingan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Tekanan dari pasar global memaksa Indonesia untuk tetap terikat pada standar internasional yang kadang kala merugikan kepentingan jangka panjang rakyat. Warburton (2024) menekankan bahwa kapasitas negara Indonesia diuji dalam kemampuannya menegosiasikan kontrak-kontrak strategis tanpa harus mengorbankan hak berdaulat atas tanah dan lingkungan. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa sering kali terjadi kompromi kebijakan demi menjaga kepercayaan investor. Implikasi dari fenomena ini adalah lahirnya kebijakan yang bersifat teknokratis-ekonomis namun

kehilangan jiwa kerakyatan, yang pada akhirnya dapat mengancam legitimasi pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

### **Menakar Kapasitas Negara: Tantangan Independensi dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Kapasitas negara merupakan elemen kunci dalam mempertahankan independensi kebijakan. Kajian ini menemukan bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah minimnya daya tawar birokrasi dalam menghadapi lobi-lobi internasional yang canggih. Ilmu Pemerintahan menekankan pentingnya otonomi birokrasi agar tidak terjebak dalam pembajakan kebijakan (*policy capture*). Namun, penetrasi kepentingan investasi asing sering kali masuk melalui celah-celah koordinasi antar-lembaga yang lemah. Susanto (2022) menjelaskan bahwa ketika institusi pemerintahan saling tumpang tindih dalam kewenangan, aktor luar memiliki ruang lebih besar untuk melakukan negosiasi yang bersifat transaksional. Independensi kebijakan seharusnya bermula dari institusi yang solid, namun realitasnya menunjukkan bahwa fragmentasi otoritas di Indonesia sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan modal global untuk mendikte agenda pembangunan nasional.

Selain itu, tantangan independensi kebijakan juga berkaitan dengan ketergantungan teknologi dan pengetahuan dari pihak luar. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik yang efektif membutuhkan basis data dan analisis yang kuat. Ketergantungan Indonesia pada konsultan asing atau lembaga internasional dalam merancang naskah akademik kebijakan merupakan bentuk intervensi halus yang sering diabaikan. Hal ini menciptakan pola pikir kebijakan yang cenderung seragam (*one-size-fits-all*) dan tidak sensitif terhadap konteks lokal. Dalam pandangan Ilmu Pemerintahan, kedaulatan pengetahuan merupakan prasyarat bagi kedaulatan politik. Selama proses berpikir kebijakan masih didikte oleh kerangka kerja yang dibawa bersama investasi asing, maka independensi kebijakan Indonesia akan tetap berada pada level yang semu. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas riset domestik dan naskah akademik yang berbasis pada kepentingan nasional murni agar tidak mudah terdistorsi oleh narasi pasar global.

### **Implikasi Terhadap Legitimasi Pemerintah dan Kepercayaan Publik**

Dampak jangka panjang dari berkurangnya independensi kebijakan adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa bahwa regulasi yang dihasilkan lebih banyak menguntungkan korporasi asing dibandingkan warga negara sendiri, legitimasi pemerintahan akan mengalami erosi. Dalam Ilmu Pemerintahan, legitimasi adalah fondasi kekuasaan; tanpa dukungan publik yang tulus, pemerintah akan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis di masa depan. Aspinall dan Berenschot (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan antara kepentingan elit yang beraliansi dengan modal asing dan aspirasi rakyat dapat memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, menjaga independensi kebijakan bukan hanya soal martabat bangsa, melainkan juga strategi untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan itu sendiri.

Kebijakan yang tidak independen juga berisiko menciptakan ketergantungan jangka panjang yang sulit diputus. Investasi asing yang masuk dengan persyaratan yang mengikat kedaulatan kebijakan akan membuat pemerintah kehilangan fleksibilitas dalam merespons krisis ekonomi atau perubahan aspirasi publik di masa depan. Analisis ini menegaskan bahwa kemandirian negara harus ditempatkan sebagai variabel utama dalam setiap proses negosiasi investasi. Pemerintah harus memiliki keberanian untuk menolak tawaran modal jika konsekuensinya adalah penyerahan otoritas regulasi yang prinsipil. Hanya dengan pemerintahan yang bersih dan berdaulat, investasi asing dapat ditransformasikan menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **Strategi Penguatan Independensi: Menuju Tata Kelola yang Mandiri**

Sebagai bentuk solusi dari tantangan yang dipaparkan, kajian ini mengusulkan penguatan strategi nasional dalam pengelolaan investasi asing yang berbasis pada kedaulatan legislasi. Penguatan ini harus dimulai dengan transparansi total dalam setiap proses perundingan kontrak investasi strategis. Dengan melibatkan pengawasan publik dan lembaga legislatif secara substansial, ruang bagi intervensi lobi asing yang tidak sehat dapat diminimalisir.

Selain itu, diperlukan penguatan "imunitas birokrasi" melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan agar mampu melakukan analisis dampak kebijakan secara mandiri tanpa

harus bergantung pada konsultan eksternal. Independensi kebijakan Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada seberapa kuat negara mampu menegaskan otoritasnya sebagai pengatur pasar, bukan sekadar pelayan modal asing. Strategi ini harus menjadi agenda prioritas dalam setiap rencana pembangunan nasional untuk memastikan Indonesia tetap berdaulat di tengah arus globalisasi yang semakin tidak menentu.

## Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa independensi kebijakan negara Indonesia tidak lagi bersifat absolut, melainkan menjadi arena kontestasi yang dinamis di bawah tekanan kapitalisme global. Posisi negara mengalami pergeseran dari aktor penentu menjadi aktor yang adaptif terhadap tuntutan pasar internasional, sehingga kedaulatan legislasi dan otonomi institusional cenderung mengalami pelunakan. Intervensi aktor ekonomi global berlangsung secara sistemik melalui ketergantungan modal, lobi internasional, dan kerangka kebijakan yang seragam. Secara empiris, formulasi kebijakan menunjukkan orientasi yang semakin pro-investasi, didukung oleh lemahnya kapasitas institusional, fragmentasi birokrasi, serta ketergantungan pada keahlian eksternal. Kondisi ini meningkatkan risiko pembajakan kebijakan (*policy capture*) dan berdampak pada penurunan legitimasi serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, independensi kebijakan perlu ditegaskan sebagai indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatannya mensyaratkan reformasi struktural melalui peningkatan kapasitas birokrasi, kemandirian produksi pengetahuan, dan transparansi dalam proses kebijakan. Dengan demikian, negara dapat menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan kepentingan nasional secara berkelanjutan.

## Referensi

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Clientelism, patrimonialism, and corruption in post-Soeharto Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2021). *Demokrasi dijual: Klientelisme, patronase, dan korupsi di Indonesia pasca-Soeharto (Edisi Bahasa Indonesia)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. Sage Publications.
- Mietzner, M. (2021). *Indonesia's democratic decline: The costs of oligarchic resurgence*. *Journal of Democracy*, 32(1), 100–115. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0004>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2020). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (8th ed.)*. Pearson Education.
- Prasetyo, A. B., & Hidayat, N. (2023). *Ekonomi politik investasi: Dilema kedaulatan dalam regulasi penanaman modal di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 15(2), 45–62.
- Rizky, M., & Sudirman, A. (2021). *Kedaulatan negara di tengah hegemoni korporasi multinasional: Perspektif ekonomi politik internasional*. *Jurnal Hubungan Internasional Global*, 9(1), 12–28.
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode kajian kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2022). *Tata kelola pemerintahan dan independensi kebijakan: Studi kasus regulasi sektor strategis di Indonesia*. *Perspektif Kebijakan Publik*, 10(3), 201–218.

Warburton, E. (2020). *Resource nationalism in Indonesia: Ownership, structure, and state capacity*. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 294–320. <https://doi.org/10.1355/cs42-2d>

Warburton, E. (2024). *Resource nationalism in Indonesia: Ownership, structure, and state capacity*. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 30–55.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Sage Publications.